

ANALISIS EFEKTIFITAS DAN AKUNTABILITAS SERTA TRANSPARANSI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

(Studi Kasus di UPTD SMPN 8 dan UPTD SMPN 12 Pematangsiantar)

¹Juanda Panjaitan, ²Hisarma Saragih, ³Ika Rosenta Purba, ^{4*}Tioner Purba

¹Program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun

^{2,3}Universitas Simalungun

Email korespondensi: tionerpurba47@email.com

Abstrak: Salah satu bentuk pendanaan pendidikan dasar yang signifikan dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS merupakan program nasional di bidang pendidikan yang menyerap anggaran besar dan langsung berhubungan dengan hajat hidup masyarakat luas. Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka Wajib Belajar Sembilan Tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada UPTD SMP Negeri 8 dan UPTD SMP Negeri 12 Pematangsiantar. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi kasus multisitus. Populasi penelitian terdiri atas kepala sekolah, guru/tenaga kependidikan, komite sekolah, dan orang tua siswa dengan jumlah responden masing-masing 50 orang pada setiap sekolah. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan SPSS. Instrumen penelitian telah melalui uji validitas dan reliabilitas serta dinyatakan layak. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Hasil uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov menunjukkan data tidak berdistribusi normal (Sig. 0,000 < 0,05), sehingga analisis hubungan antar variabel menggunakan uji korelasi non-parametrik Spearman's Rho. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS pada kedua sekolah berada pada kategori baik hingga sangat baik, dengan tingkat penerapan yang relatif lebih tinggi pada UPTD SMP Negeri 12 Pematangsiantar. Uji Spearman's Rho menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan (Sig. 0,000 < 0,05) antara efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dengan pengelolaan Dana BOS. Disimpulkan bahwa penerapan prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi berperan penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola Dana BOS di lingkungan sekolah.

Kata Kunci : Efektifitas, Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Abstract: One significant form of funding for basic education from the State Budget (APBN) is the School Operational Assistance (BOS). The BOS program is a national education program that absorbs a significant budget and directly impacts the livelihoods of the wider community. The BOS program aims to ease the burden on the community in financing education within the framework of the Nine-Year Compulsory Education Program. This study aims to analyze the effectiveness, accountability, and transparency in the management of School Operational Assistance Funds (BOS) at UPTD SMP Negeri 8 and UPTD SMP Negeri 12 Pematangsiantar. The research uses a quantitative approach with a multisite case study design. The research population consisted of principals, teachers/education staff, school committees, and parents of students with a total of 50 respondents each in each school. Data were collected through a Likert scale questionnaire and analyzed using SPSS. The research instrument has gone through validity and reliability tests and has been declared feasible. The classical assumption test includes normality, multicollinearity, and heteroscedasticity tests. The results of the Kolmogorov-Smirnov One-Sample normality test showed that the data was not normally distributed (Sig. 0.000 < 0.05), so the relationship between variables was analyzed using the Spearman's Rho non-parametric correlation test. The results of the study show that the management of BOS Funds in both schools is in



the good to very good category, with a relatively higher level of implementation in the UPTD SMP Negeri 12 Pematangsiantar. The Spearman's Rho test showed a very strong and significant positive relationship (Sig. 0.000 < 0.05) between effectiveness, accountability, and transparency with the management of the BOS Fund. It was concluded that the application of the principles of effectiveness, accountability, and transparency plays an important role in improving the quality of BOS Fund governance in the school environment.

Keywords: Effectiveness, Accountability, and Transparency of School Operational Assistance (BOS) Fund Management

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk pendanaan pendidikan dasar yang signifikan dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS merupakan program nasional di bidang pendidikan yang menyerap anggaran besar dan langsung berhubungan dengan hajat hidup masyarakat luas. Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka Wajib Belajar Sembilan Tahun. Program BOS sangat berperan untuk mempertahankan angka keikutsertaan bersekolah, yang dilihat melalui indikator angka partisipasi kasar (APK), disamping itu juga harus berkontribusi penting dalam peningkatan mutu pendidikan dasar, serta tuntutan peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya (Djalal dan Supriadi, 2001).

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Namun walau telah dua puluh tahun bergulir sejak diluncurkannya Program BOS pada bulan Juli 2005, BOS belum mampu memenuhi harapan masyarakat menikmati pendidikan dasar gratis, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar. Padahal dana yang disediakan pemerintah tidak sedikit dan cenderung terus bertambah

Permasalahan lain yang sering muncul pada setiap satuan pendidikan baik sekolah swasta maupun sekolah negeri, antara lain sekolah tetap menarik iuran bagi siswa miskin, penggelembungan APBS, proses belajar mengajar tetap kurang efektif sampai dengan terjadinya kesalahan dalam penggunaan dana BOS tersebut. Kepala sekolah kurang transparan dalam pengelolaan dana BOS, ketidak fahaman orang tua murid tentang dana BOS. Dampak lain yang dapat terjadi adalah penyelenggaraan sekolah yang tidak sehat, proses belajar mengajar kurang optimal, dan pada akhirnya mutu pendidikan akan terus menurun.

Besarnya dana yang belum termanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) menggambarkan sejak program BOS diluncurkan tahun 2005, pungli dan penyimpangan selalu mengiringinya. Sudah menjadi simbiosis mutualisme antara sekolah dan dinas pendidikan berkenaan penyunatan dana BOS demi kelancaran cairnya dana. Oleh karena itu, dibutuhkan kehendak, kemauan, kepedulian dan partisipasi aktif stakeholder pendidikan dalam mengawal BOS. Berdasarkan laporan ICW tentang dugaan korupsi anggaran pendidikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari 142 kasus korupsi anggaran pendidikan periode 2004-2009 diperkirakan total kerugian negara mencapai Rp 243 miliar (Suara Pembaruan, September 2009).

Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai salah satu sekolah yang menjadi sasaran pemberian dana BOS, sudah tentu dituntut untuk melakukan pengelolaan secara efektif dan efisien, dalam hal penggunaan dana harus transparan serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Pengelolaan program BOS di SMP tersebut harus dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan akses pelayanan pendidikan khususnya masyarakat miskin, serta dapat meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka menyelesaikan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, hal ini mengingat bahwa salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP dan sederajat. Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana efektifitas pengelolaan dana BOS serta



akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS tersebut pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Pematangsiantar.

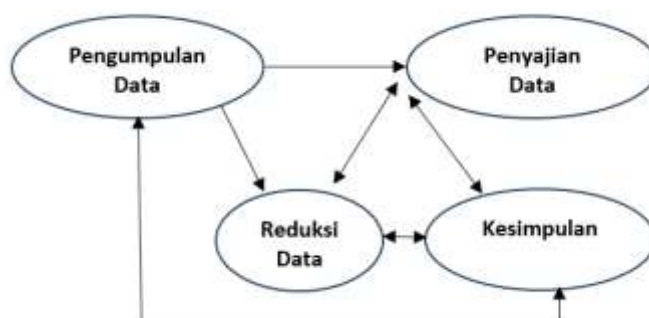
METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di UPTD SMPN 8 dan UPTD SMPN 12 Pematangsiantar dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui penelitian lapangan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kedekatan wilayah, kemudahan akses terhadap Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, serta keberadaan kedua sekolah sebagai satuan pendidikan yang konsisten dan aktif dalam pengelolaan Dana BOS. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pengelolaan Dana BOS di lingkungan sekolah, khususnya pada jenjang SMP. Metode penelitian kualitatif memiliki beberapa jenis, antara lain penelitian naturalistik, fenomenologi, studi kasus, analisis isi, dan etnografi (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini, desain yang digunakan adalah studi multisitus, yaitu penelitian yang dilakukan pada lebih dari satu situs atau lokasi penelitian dengan karakteristik yang relatif sama.

Desain multisitus digunakan karena penelitian ini mencakup dua sekolah, yaitu UPTD SMPN 8 dan UPTD SMPN 12 Pematangsiantar, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai pengelolaan Dana BOS. Studi multisitus merupakan kajian yang mengeksplorasi suatu masalah secara mendalam dengan berbagai sumber informasi dari beberapa tempat yang memiliki ciri khas yang sama (Abdul Aziz, 1989). Hal ini sejalan dengan Margono (2003) dan Arikunto (2010) yang menyatakan bahwa studi multisitus bertujuan mencermati suatu unit secara mendalam untuk menemukan berbagai variabel penting yang melatarbelakangi fenomena yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang secara langsung melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi data. Informan penelitian meliputi Tim BOS Sekolah, yaitu kepala sekolah, bendahara BOS, operator BOS, pengurus barang, petugas perpustakaan, petugas kebersihan, perwakilan guru dan tenaga kependidikan, komite sekolah, serta orang tua/wali peserta didik. Data juga diperoleh melalui studi dokumen dari UPTD SMPN 8, UPTD SMPN 12 Pematangsiantar, dan sumber lain yang relevan di lapangan.

Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik yang dikemukakan oleh *Miles* dan *Huberman*. Analisis dilakukan saat dalam pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat melaksanakan interview, sudah melakukan analisis, jika saat wawancara informasi terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai dianggap data sudah kredibel. *Miles* dan *Huberman* (1992) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah valid (jenuh). Aktifitas dalam analysis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.



Gambar 1. Komponen dalam analisis data

Dikarenakan penelitian ini dilakukan pada multisitus yaitu di dua lokasi, maka analisis data yang dilakukan juga akan disesuaikan dengan design multisitus. Analisis data dilakukan dengan dua tahap, yang pertama dengan melakukan teknik analisis data tunggal kemudian dilakukan analisis antar situs.

Teknik Analisis Data Tunggal

Analisis data tunggal merupakan kegiatan analisis data yang dilakukan secara terus menerus, dan kesimpulan bisa ditarik secara langsung, apakah itu yang berlangsung di lapangan, ataupun setelah tuntas dari lapangan. Hasil ini bukan hanya berdasarkan dari data yang dianalisa, melainkan juga berupa catatan penting dari lapangan, observasi, dokumen-dokumen dan hal-hal lain yang didapatkan pada proses penelitian di lapangan. Seperti yang dikutip dari *Miles* dan *Hubermant* (1992) secara umum tahap analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

Analisis Data Multi Situs

Dalam analisis multi data, penelitian ini dilakukan pada dua satuan pendidikan, yaitu UPTD SMPN 8 dan UPTD SMPN 12 Pematangsiantar, untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengelolaan Dana BOS hingga dapat ditarik kesimpulan lintas kasus. Dalam penelitian kualitatif, lokasi penelitian merupakan sumber utama bagi peneliti untuk menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti melalui pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian juga dipahami sebagai situasi sosial yang mencakup tiga unsur utama, yaitu tempat, pelaku, dan kegiatan (Nasution, 1996). UPTD SMP Negeri 8 Pematangsiantar berlokasi di Jalan Pane No. 38, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, dan menerima Dana BOS Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 900.900.000 yang disalurkan dalam dua tahap, yaitu tahap I Januari–Juni sebesar Rp. 450.450.000 dan tahap II Juli–Desember sebesar Rp. 450.450.000. Sementara itu, UPTD SMP Negeri 12 Pematangsiantar berlokasi di Jalan Sibolga No. 26, Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, dan menerima Dana BOS Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 935.000.000, dengan penyaluran dalam dua tahap sesuai data sekolah.

Langkah penelitian dilakukan melalui pengumpulan data di UPTD SMP Negeri 8 Pematangsiantar hingga mencapai tingkat kejenuhan data, kemudian dilanjutkan pada lokasi kedua, yaitu UPTD SMP Negeri 12 Pematangsiantar, dengan prosedur yang sama. Temuan pada masing-masing lokasi disusun berdasarkan kategori dan dinamika yang muncul, kemudian dianalisis secara induktif konseptual dan dijelaskan secara naratif sehingga menghasilkan temuan khusus pada setiap sekolah. Temuan dari UPTD SMP Negeri 8 dan UPTD SMP Negeri 12 Pematangsiantar selanjutnya dibandingkan dan dipadukan melalui analisis lintas kasus untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam pengelolaan Dana BOS. Pada tahap akhir, kedua temuan sementara tersebut dianalisis secara simultan guna menyusun konsepsi yang sistematis mengenai karakteristik, dinamika, serta pola pengelolaan Dana BOS pada kedua lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Asumsi Klasik

Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis One-Sample Kolmogrov-Smirnov, yaitu dengan membandingkan Kolmogrov-Smirnov hitung dengan nilai signifikansi 0,05. One-Sample Kolmogrov-Smirnov pada uji non parametrik. Hasil uji One-Sample Kolmogrov-Smirnov dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Uji Normalitas Pada SMP Negeri 8 Pematangsiantar

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.17647062
Most Extreme Differences	Absolute	.341
	Positive	.258
	Negative	-.341
Test Statistic		.341
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.000 ^d
99% Confidence Interval	Lower Bound	.000
	Upper Bound	.000

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber: Data diolah peneliti, 2026



Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test terhadap nilai residual dari model yang melibatkan variabel efektivitas (X_1), akuntabilitas (X_2), transparansi (X_3), serta bantuan sosial sekolah/pengelolaan Dana BOS (Y) pada SMP Negeri 8 Pematangsiantar. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dalam model penelitian berdistribusi normal sebagai salah satu syarat dalam analisis parametrik.

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 dengan jumlah sampel sebanyak 50 responden. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah sebagai berikut :

- Jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 maka data berdistribusi normal.
- Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal

Karena nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual pada SMP Negeri 8 Pematangsiantar tidak berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam analisis parametrik tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya asumsi normalitas ini mengindikasikan bahwa penggunaan analisis parametrik, seperti korelasi Pearson atau regresi linier klasik, tidak dapat diterapkan secara optimal tanpa perlakuan khusus. Oleh karena itu, untuk menguji hubungan antara variabel efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi terhadap bantuan sosial sekolah di SMP Negeri 8 Pematangsiantar, digunakan uji korelasi non-parametrik Spearman's Rho.

Penggunaan Spearman's Rho dinilai lebih tepat karena metode ini tidak mensyaratkan distribusi data normal dan sesuai untuk data yang diperoleh melalui instrumen kuesioner berskala Likert yang bersifat ordinal. Dengan demikian, pendekatan analisis yang digunakan tetap memenuhi kaidah metodologi penelitian dan menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Tabel 5. Uji Normalitas Pada SMP Negeri 12 Pematangsiantar

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.24214748
Most Extreme Differences	Absolute	.380
	Positive	.380
	Negative	-.310
Test Statistic		.380
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.000 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound Upper Bound

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525.

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Dalam penelitian yang dilaksanakan di SMP Negeri 12 Pematangsiantar, pengujian normalitas data dilakukan menggunakan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test terhadap residual model penelitian. Model tersebut mencakup variabel efektivitas (X_1), akuntabilitas (X_2), transparansi (X_3), serta bantuan sosial sekolah/pengelolaan Dana BOS (Y). Pengujian ini bertujuan untuk memastikan apakah distribusi residual memenuhi asumsi normalitas sebagai prasyarat dalam analisis statistik parametrik.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 dengan jumlah responden sebanyak 50 orang. Dalam uji normalitas, ketentuan yang digunakan adalah apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal, sedangkan apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal.

Karena nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 berada di bawah batas 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa residual model pada SMP Negeri 12 Pematangsiantar tidak mengikuti distribusi normal. Hal ini berarti asumsi normalitas sebagai salah satu syarat dalam analisis parametrik tidak terpenuhi. Kondisi tersebut mengharuskan peneliti untuk menggunakan pendekatan analisis yang tidak mensyaratkan distribusi normal. Oleh sebab itu, dalam menguji hubungan antara efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi terhadap bantuan sosial sekolah digunakan uji korelasi Spearman's Rho sebagai metode non-parametrik.



Pemilihan Spearman’s Rho dianggap tepat karena teknik ini tidak bergantung pada asumsi normalitas data dan relevan digunakan pada data yang diperoleh melalui kuesioner dengan skala Likert yang bersifat ordinal. Dengan demikian, metode analisis yang diterapkan tetap selaras dengan karakteristik data dan prinsip metodologi penelitian yang baik.

Pengujian Korelasi (Sparman rho)
Uji Sparman’s rho pada SMP Negeri 8 Pematangsiantar

Correlations				EFEKTIVITAS	AKUNTABILITAS	TRANSPARANSI	BANTUAN SOSIAL SEKOLAH
Spearman's rho	EFEKTIVITAS	Correlation Coefficient	1.000	.995**	.976**	.995**	
		Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	
		N	50	50	50	50	
	AKUNTABILITAS	Correlation Coefficient	.909**	1.000	.931**	.913**	
		Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	
		N	50	50	50	50	
	TRANSPARANSI	Correlation Coefficient	.976**	.931**	1.000	.971**	
		Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	
		N	50	50	50	50	
	BANTUAN SOSIAL SEKOLAH	Correlation Coefficient	.995**	.913**	.971**	1.000	
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		
		N	50	50	50	50	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Setelah diketahui bahwa data penelitian di SMP Negeri 8 Pematangsiantar tidak berdistribusi normal, maka pengujian hubungan antarvariabel dilakukan menggunakan uji korelasi non-parametrik Spearman’s Rho. Uji ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi terhadap bantuan sosial sekolah atau pengelolaan Dana BOS. Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap 50 responden, efektivitas (X1) memiliki hubungan sangat kuat dan signifikan dengan bantuan sosial sekolah (Y), ditunjukkan oleh koefisien korelasi sebesar 0,995 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif pengelolaan Dana BOS, maka semakin baik pula pelaksanaan bantuan sosial sekolah. Selanjutnya, akuntabilitas (X2) juga memiliki hubungan sangat kuat dan signifikan dengan bantuan sosial sekolah, dengan koefisien korelasi sebesar 0,913 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, yang berarti semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan Dana BOS, maka semakin baik pelaksanaan bantuan sosial sekolah.

Selain itu, transparansi (X3) memiliki hubungan sangat kuat dan signifikan dengan bantuan sosial sekolah, ditunjukkan oleh koefisien korelasi sebesar 0,971 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Artinya, semakin terbuka dan transparan pengelolaan Dana BOS, maka semakin optimal pelaksanaan bantuan sosial sekolah di SMP Negeri 8 Pematangsiantar. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi memiliki hubungan positif, sangat kuat, dan signifikan terhadap bantuan sosial sekolah. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan Dana BOS sangat dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan program, pertanggungjawaban yang jelas, serta keterbukaan informasi kepada pihak terkait, sehingga hipotesis penelitian yang menyatakan adanya hubungan antara efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi terhadap bantuan sosial sekolah dapat diterima.

Uji Sparman’s rho pada SMP Negeri 12 Pematangsiantar

Correlations				EFEKTIVITAS	AKUNTABILITAS	TRANSPARANSI	BANTUAN SOSIAL SEKOLAH
Spearman's rho	EFEKTIVITAS	Correlation Coefficient	1.000	.918**	.979**	.988**	
		Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	
		N	50	50	50	50	
	AKUNTABILITAS	Correlation Coefficient	.919**	1.000	.966**	.950**	
		Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	
		N	50	50	50	50	
	TRANSPARANSI	Correlation Coefficient	.979**	.966**	1.000	.962**	
		Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	
		N	50	50	50	50	
	BANTUAN SOSIAL SEKOLAH	Correlation Coefficient	.988**	.950**	.962**	1.000	
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		
		N	50	50	50	50	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan hasil uji normalitas yang menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal, pengujian hubungan antarvariabel dalam penelitian di SMP Negeri 12 Pematangsiantar dilakukan menggunakan uji korelasi non-parametrik Spearman’s Rho. Uji ini digunakan untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antara efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi terhadap bantuan sosial



sekolah atau pengelolaan Dana BOS. Hasil pengujian terhadap 50 responden menunjukkan bahwa efektivitas (X_1) memiliki hubungan positif, sangat kuat, dan signifikan dengan bantuan sosial sekolah (Y), dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,868 dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin efektif pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 12 Pematangsiantar, maka pelaksanaan bantuan sosial sekolah juga semakin baik.

Selanjutnya, akuntabilitas (X_2) memiliki hubungan positif, sangat kuat, dan signifikan dengan bantuan sosial sekolah, ditunjukkan oleh koefisien korelasi sebesar 0,950 dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Artinya, semakin tinggi pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana BOS, maka semakin optimal pelaksanaan bantuan sosial sekolah. Transparansi (X_3) juga menunjukkan hubungan positif, sangat kuat, dan signifikan dengan bantuan sosial sekolah, dengan koefisien korelasi sebesar 0,863 dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi memiliki hubungan yang sangat kuat dan signifikan terhadap bantuan sosial sekolah di SMP Negeri 12 Pematangsiantar, sehingga hipotesis penelitian yang menyatakan adanya hubungan antara ketiga variabel tersebut terhadap bantuan sosial sekolah dapat diterima.

Analisis Deskriptif

SMP Negeri 8 Pematangsiantar

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
EFEKTIVITAS	50	13	25	18.50	2.053
AKUNTABILITAS	50	14	25	18.30	1.854
TRANSPARANSI	50	13	25	18.64	1.882
BANTUAN SOSIAL SEKOLAH	50	14.00	25.00	18.7600	1.67283
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai persepsi responden terhadap variabel efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan bantuan sosial sekolah dalam pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 8 Pematangsiantar. Jumlah responden yang dianalisis sebanyak 50 orang (Valid N = 50). Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Efektivitas

Variabel efektivitas memiliki nilai minimum sebesar 13 dan maksimum sebesar 25, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 18,50 serta standar deviasi sebesar 2,053. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa secara umum responden menilai efektivitas pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 8 Pematangsiantar berada dalam kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program, penggunaan dana, serta pencapaian tujuan kegiatan sekolah dinilai telah berjalan dengan baik. Standar deviasi sebesar 2,053 menunjukkan bahwa variasi jawaban responden relatif kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa persepsi responden terhadap efektivitas cenderung homogen.

2. Akuntabilitas

Variabel akuntabilitas memiliki nilai minimum 14 dan maksimum 25, dengan rata-rata sebesar 18,30 dan standar deviasi sebesar 1,854. Nilai mean ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 8 Pematangsiantar juga berada dalam kategori tinggi. Artinya, pertanggungjawaban penggunaan dana, baik dalam bentuk laporan maupun administrasi, telah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai ketentuan yang berlaku. Standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa jawaban responden tidak terlalu bervariasi dan cenderung konsisten.

3. Transparansi

Variabel transparansi memiliki nilai minimum 13 dan maksimum 25, dengan nilai rata-rata sebesar 18,64 dan standar deviasi sebesar 1,882. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa tingkat transparansi dalam pengelolaan Dana BOS berada dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan adanya keterbukaan informasi kepada pihak-pihak terkait, seperti guru, komite sekolah, dan pihak internal sekolah lainnya. Standar deviasi yang tidak terlalu besar menunjukkan bahwa persepsi responden relatif seragam mengenai transparansi pengelolaan dana.

4. Bantuan Operasional Sekolah



Variabel bantuan operasional sekolah memiliki nilai minimum sebesar 14 dan maksimum 25, dengan nilai rata-rata sebesar 18,76 dan standar deviasi sebesar 1,67283. Nilai mean yang paling tinggi dibandingkan variabel lainnya menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan sosial sekolah di SMP Negeri 8 Pematangsiantar dinilai baik dan optimal oleh responden. Standar deviasi yang paling kecil di antara variabel lain menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap bantuan sosial sekolah paling konsisten dan relatif homogen

Secara keseluruhan, keempat variabel dalam penelitian ini berada pada kategori tinggi, yang berarti bahwa pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 8 Pematangsiantar dinilai telah berjalan dengan baik dari aspek efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Kondisi ini juga tercermin pada variabel bantuan sosial sekolah yang menunjukkan nilai rata-rata tertinggi.

Hasil ini menggambarkan bahwa tata kelola Dana BOS di SMP Negeri 8 Pematangsiantar telah mendukung pelaksanaan bantuan sosial sekolah secara optimal, meskipun tetap diperlukan evaluasi berkelanjutan untuk menjaga kualitas pengelolaan dan meningkatkan aspek yang masih dapat disempurnakan.

SMP Negeri 12 Pematangsiantar

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
EFEKTIVITAS	50	17	25	19.30	1.843
AKUNTABILITAS	50	15	25	18.92	1.850
TRANSPARANSI	50	15	25	18.80	1.927
BANTUAN SOSIAL SEKOLAH	50	15.00	25.00	19.0200	1.86799
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Analisis deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai persepsi responden terhadap variabel efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan bantuan sosial sekolah dalam pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 12 Pematangsiantar. Jumlah responden yang dianalisis sebanyak 50 orang (Valid N = 50), sehingga seluruh data dapat digunakan dalam proses analisis. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Efektivitas

Variabel efektivitas memiliki nilai minimum sebesar 17 dan maksimum sebesar 25, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 19,30 serta standar deviasi sebesar 1,843. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 12 Pematangsiantar berada dalam kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan dana telah sesuai dengan tujuan yang direncanakan, program berjalan dengan baik, serta sasaran kegiatan sekolah dapat tercapai secara optimal. Standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa jawaban responden cenderung homogen, sehingga persepsi terhadap efektivitas relatif konsisten di antara responden.

2. Akuntabilitas

Variabel akuntabilitas memiliki nilai minimum sebesar 15 dan maksimum sebesar 25, dengan nilai rata-rata sebesar 18,92 dan standar deviasi sebesar 1,850. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS berada pada kategori tinggi. Artinya, sistem pertanggungjawaban penggunaan dana, penyusunan laporan, serta mekanisme administrasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Standar deviasi yang tidak terlalu besar mengindikasikan bahwa perbedaan persepsi antar responden relatif kecil.

3. Transparansi

Variabel transparansi memiliki nilai minimum sebesar 15 dan maksimum sebesar 25, dengan nilai rata-rata sebesar 18,80 serta standar deviasi sebesar 1,927. Nilai mean ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 12 Pematangsiantar berada dalam kategori tinggi. Hal ini menggambarkan adanya keterbukaan informasi kepada pihak internal maupun eksternal sekolah, seperti guru, komite sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya. Meskipun standar deviasi sedikit lebih besar dibandingkan variabel lain, nilai tersebut masih menunjukkan bahwa persepsi responden relatif seragam.



4. Bantuan Sosial Sekolah

Variabel bantuan sosial sekolah memiliki nilai minimum sebesar 15 dan maksimum sebesar 25, dengan nilai rata-rata sebesar 19,02 serta standar deviasi sebesar 1,86799. Nilai rata-rata ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan sosial sekolah di SMP Negeri 12 Pematangsiantar dinilai berada dalam kategori tinggi. Artinya, bantuan yang diberikan melalui Dana BOS telah dirasakan manfaatnya dan mendukung kegiatan operasional sekolah secara optimal. Standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa responden memiliki pandangan yang cukup konsisten terhadap pelaksanaan bantuan sosial sekolah.

Secara keseluruhan, seluruh variabel penelitian di SMP Negeri 12 Pematangsiantar menunjukkan nilai rata-rata yang berada pada kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan Dana BOS telah berjalan dengan baik ditinjau dari aspek efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi, serta berdampak positif terhadap pelaksanaan bantuan sosial sekolah.

Jika dibandingkan secara umum, nilai rata-rata pada SMP Negeri 12 cenderung sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan SMP Negeri 8, terutama pada variabel efektivitas dan bantuan sosial sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 12 relatif lebih optimal berdasarkan persepsi responden.

Pembahasan

Pembahasan Efektifitas Pemanfaatan Dana BOS di UPTD SMPN 8 Pematangsiantar

Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan anggaran belanja sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat, dimana anggaran pendidikan bersumber dari anggaran negara yang harus memprioritaskan anggaran pendidikan. Dana BOS adalah program yang diusung pemerintah untuk membantu sekolah agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Bantuan yang diberikan melalui Dana BOS yakni berbentuk Dana. Dana tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Pencairan dana BOS Kemendikbud RI memaparkan bahwa aturan Penyaluran dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) Reguler akan dilakukan pada tahun 2023, 2024 s.d. sekarang dibagi dalam dua tahapan. Tahap 1 akan disalurkan sebesar 50% pada awal Januari, selanjutnya Tahap 2 disalurkan paling cepat bulan Juli melalui rekening satuan pendidikan. Penyaluran dana BOS Reguler Tahun anggaran 2023 Rp. 909.900.000,- dan Tahun anggaran 2024 Rp. 874.500.000,-.

Dengan prosedur pengelolaan anggaran sebagai berikut :

a. Perencanaan

Perencanaan dana BOS di UPTD SMPN 8 Pematangsiantar dimulai dengan penyusunan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) sebagai dokumen perencanaan kerja tahunan sekolah yang memuat anggaran pendapatan dan belanja sekolah selama satu tahun pelajaran. Penyusunan RKAS dilakukan berdasarkan kebutuhan prioritas sekolah, khususnya kebutuhan operasional nonpersonalia yang mendukung peningkatan mutu pembelajaran dan kelancaran kegiatan sekolah. Dalam proses ini, kepala sekolah berperan sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dana BOS, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban kepada pemerintah. Perencanaan dilakukan secara bersama oleh tim yang dibentuk kepala sekolah, yang terdiri dari bendahara, operator, pengurus barang, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, serta orang tua/wali murid untuk mengidentifikasi dan mengusulkan kebutuhan sekolah sesuai dengan proses belajar mengajar.

Penyusunan RKAS di UPTD SMPN 8 Pematangsiantar mengacu pada petunjuk teknis penggunaan dana BOS, termasuk ketentuan mengenai kegiatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dibiayai. Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana awal atau tidak dapat direalisasikan, sekolah menyusun RKAS perubahan dengan mencantumkan kegiatan yang diubah, diganti, atau ditambahkan, kemudian diajukan kembali kepada Dinas Pendidikan. Dengan demikian, perencanaan dana BOS di UPTD SMPN 8 Pematangsiantar telah dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah, analisis kebutuhan, penentuan skala prioritas, serta penyesuaian terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dana BOS telah sesuai dengan Permendikbud No. 63 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis BOSP, karena dilakukan berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama.



b. Pelaksanaan

Dalam aspek pelaksanaan dana BOS di UPTD SMPN 8 Pematangsiantar sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yakni PERMENDIKBUD No. 53 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis (JUKNIS Dana BOS) yang terdiri dari :

1. Penerimaan Dana

Dalam penelitian ini pada UPTD SMPN 8 Pematangsiantar mengenai penerimaan dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) telah memenuhi syarat : dengan memiliki nomor pokok nasional yang terdata pada DAPODIK, telah mengisi dan melakukan pemutakhiran DAPODIK sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan, memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada dapodik, memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan.

2. Besaran Alokasi Dana

Besaran alokasi dana BOS di UPTD SMPN 8 Pematangsiantar dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dana BOS Reguler pada masing-masing daerah dikalikan jumlah peserta didik yaitu :

- Tahun anggaran 2023 di UPTD SMPN 8 Pematangsiantar yakni sejumlah siswa 819 orang x Rp. 1.100.000 = Rp. 909.900.000,-.
- Tahun anggaran 2024 di UPTD SMPN 8 Pematangsiantar yakni sejumlah siswa 795 orang x Rp. 1.100.000 = Rp. 874.500.000,-.

3. Penyaluran Dana

Penyaluran dana BOS di UPTD SMPN 8 Pematangsiantar dilakukan ke rekening Satuan Pendidikan yang diatur dalam Surat Keputusan Walikota (PERWALI) Kota Pematangsiantar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar dengan memiliki kriteria berikut, seperti nama Satuan Pendidikan dengan nama yang terdaftar dalam DAPODIK, nama rekening disertai dengan nomor pokok sekolah nasional dan dikeluarkan oleh bank umum

4. Penggunaan Dana

UTPD SMPN 8 Pematangsiantar sebagai satuan pendidikan penerima dan BOS dapat langsung menggunakan dana BOS setelah disalurkan masuk ke rekening satuan pendidikan.

c. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana BOS dilakukan oleh kepala Satuan Pendidikan UPTD SMPN 8 Pematangsiantar yang bertugas dalam mengisi data satuan pendidikan secara lengkap dan valid ke dalam dapodik sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan, melakukan verifikasi dan validasi isian data satuan pendidikan yang masuk dalam DAPODIK, menyusun rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan sesuai dengan prinsip pengelolaan dana BOS dan komponen penggunaan dana BOS, melakukan konfirmasi penerimaan dana BOS yang sudah diterima melalui sistem aplikasi penyaluran dana BOS yang disediakan oleh Kementerian, melakukan penatausahaan dana BOS menggunakan dana BOS sesuai rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan, melaksanakan pengadaan barang/ jasa dalam penggunaan dana BOS, menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS dan memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan dana BOS yang dapat dibuktikan dengan laporan realisasi RKAS

d. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban penerima dana BOS membuat pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan. Pembukuan yang dilakukan oleh sekolah yaitu RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) merupakan rencana penggunaan dana BOS. Pertanggungjawaban lainnya adalah laporan penggunaan dana BOS dalam pelaporannya pihak sekolah sudah melakukan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu PERMENDIKBUD No. 63 Tahun 2023 dengan melakukan beberapa macam laporan yaitu laporan realisasi penggunaan dana tiap sumber dana, rekapitulasi realisasi penggunaan BOS, pencatatan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat, laporan aset, laporan ke Dinas Pendidikan, laporan daring ke Laman BOS Reguler. Pelaporan dana BOS di UPTDN SMPN 8 Pematangsiantar melakukan pembuatan laporan sesuai dengan PERMENDIKBUD NO. 63 Tahun



2023 tentang petunjuk teknis (JUKNIS) dana BOS. Sekolah melakukan pelaporan pertanggungjawaban kepada dinas terkait, mulai dari tingkat kota, provinsi serta tingkat pusat.

Pembahasan Efektifitas Pemanfaatan Dana BOS di UPTD SMPN 12 Pematangsiantar

Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan anggaran belanja sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat, dimana anggaran pendidikan bersumber dari anggaran negara yang harus memprioritaskan anggaran pendidikan. Dana BOS adalah program yang diusung pemerintah untuk membantu sekolah agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Bantuan yang diberikan melalui Dana BOS yakni berbentuk Dana. Dana tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga membeli alat multimedia untuk penunjang kegiatan belajar mengajar.

Pencairan dana BOS Kemendikbud RI memaparkan bahwa aturan Penyaluran dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) Reguler akan dilakukan pada tahun 2023, 2024 s.d. sekarang dibagi dalam dua tahapan. Tahap 1 akan disalurkan sebesar 50% pada awal Januari, selanjutnya Tahap 2 disalurkan paling cepat bulan Juli melalui rekening satuan pendidikan. Penyaluran dana BOS Reguler Tahun anggaran 2023 Rp. 935.000.000,- dan Tahun anggaran 2024 Rp. 873.400.000,-.

Dengan prosedur pengelolaan anggaran sebagai berikut :

a. Perencanaan

Dalam pembuatan perencanaan dana BOS di UPTD SMPN 12 Pematangsiantar dimulai dengan pembuatan RKAS sebagai rencana yang dirumuskan oleh satuan pendidikan sesuai wewenang yang ada. Dalam perencanaan keuangan sekolah membahas seluruh kegiatan dan kebutuhan untuk meningkatkan mutu siswa dalam kegiatan belajar mengajar dan mendukung kebutuhan operasional sekolah. RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) ini disusun untuk merencanakan kerja tahunan sekolah sekaligus untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja sekolah selama satu tahun pelajaran. RKAS disusun berdasarkan atas kebutuhan yang paling utama dari masing-masing kebutuhan operasional non personalia sekolah untuk jangka pendek, jangka menengah hingga jangka panjang.

Keikutsertaan kepala sekolah dalam penyusunan perencanaan adalah sebagai pertanggungjawaban utama dalam pengelolaan dana BOS. Dimana penanggung jawab utama harus mengetahui mulai dari perencanaan, pengelolaan dan proses pelaporan hingga pertanggungjawaban terhadap pemerintah. Sehingga peran kepala sekolah dalam pengelolaan anggaran sangat penting. UPTD SMPN 12 Pematangsiantar memiliki tim yang dibentuk oleh kepala sekolah untuk membahas kebutuhan yang ada di sekolah yang terdiri dari bendahara, operator, pengurus barang, guru dan tenaga kependidikan, komite sekolah dan orangtua/wali murid untuk membuat rencana anggaran dan mengusulkan apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan proses belajar mengajar. Kegiatan perencanaan ini dipimpin langsung oleh kepala sekolah sebagai penanggungjawab utama dalam perencanaan anggaran penggunaan dan BOS.

Dalam pelaksanaan kegiatan di tengah tahun pelajaran terkadang tidak sesuai dengan RKAS yang telah direncanakan di awal tahun pelajaran. Ketidaksihinggaan rencana anggaran kegiatan yang telah disusun oleh sekolah karena adanya kenyataan yang berbeda dengan anggaran yang telah dibuat. Sekolah membuat kegiatan anggaran perubahan untuk mengganti kegiatan yang tidak dapat terealisasi untuk mengganti atau menambah kegiatan tersebut dan mengajukannya kembali ke Dinas Pendidikan. Perubahan kegiatan tersebut dibuat dalam RKAS perubahan dengan mencantumkan kegiatan mana yang akan diubah dan direalisasikan oleh sekolah. UPTD SMPN 12 Pematangsiantar dalam perencanaan dana BOS sudah sesuai dengan PERMENDIKBUD No. 63 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis (JUKNIS BOSP), yang dibuktikan dengan adanya pembuatan RKAS selama satu tahun anggaran dimana perencanaan dana BOS di sekolah disahkan pada kesepakatan dan keputusan bersama.

b. Pelaksanaan

Dalam aspek pelaksanaan dana BOS di UPTD SMPN 12 Pematangsiantar sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yakni PERMENDIKBUD No. 53 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis (JUKNIS Dana BOS) yang terdiri dari:

1. Penerimaan Dana

Dalam penelitian ini pada UPTD SMPN 12 Pematangsiantar mengenai penerimaan dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) telah memenuhi syarat : dengan memiliki



nomor pokok nasional yang terdata pada DAPODIK, telah mengisi dan melakukan pemutakhiran DAPODIK sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan, memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada dapodik, memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan.

2. Besaran Alokasi Dana

Besaran alokasi dana BOS di UPTD SMPN 12 Pematangsiantar dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dana BOS Reguler pada masing-masing daerah dikalikan jumlah peserta didik yaitu :

- Tahun anggaran 2023 di UPTD SMPN 12 Pematangsiantar yakni sejumlah siswa 850 orang x Rp. 1.100.000 = Rp. 935.000.000,-.
- Tahun anggaran 2024 di UPTD SMPN 8 Pematangsiantar yakni sejumlah siswa 794 orang x Rp. 1.100.000 = Rp. 873.400.000,-.

3. Penyaluran Dana

Penyaluran dana BOS di UPTD SMPN 12 Pematangsiantar dilakukan ke rekening Satuan Pendidikan yang diatur dalam Surat Keputusan Walikota (PERWALI) Kota Pematangsiantar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar dengan memiliki kriteria berikut, seperti nama Satuan Pendidikan dengan nama yang terdaftar dalam DAPODIK, nama rekening disertai dengan nomor pokok sekolah nasional dan dikeluarkan oleh bank umum

4. Penggunaan Dana

UTPD SMPN 12 Pematangsiantar sebagai satuan pendidikan penerima dan BOS dapat langsung menggunakan dana BOS setelah disalurkan masuk ke rekening satuan pendidikan.

c. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana BOS dilakukan oleh kepala Satuan Pendidikan UPTD SMPN 12 Pematangsiantar yang bertugas dalam mengisi data satuan pendidikan secara lengkap dan valid ke dalam dapodik sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan, melakukan verifikasi dan validasi isian data satuan pendidikan yang masuk dalam DAPODIK, menyusun rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan sesuai dengan prinsip pengelolaan dana BOS dan komponen penggunaan dana BOS, melakukan konfirmasi penerimaan dana BOS yang sudah diterima melalui sistem aplikasi penyaluran dana BOS yang disediakan oleh Kementerian, melakukan penatausahaan dana BOS menggunakan dana BOS sesuai rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan, melaksanakan pengadaan barang/ jasa dalam penggunaan dana BOS, menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS dan memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan dana BOS yang dapat dibuktikan dengan laporan realisasi RKAS

d. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban penerima dana BOS membuat pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan. Pembukuan yang dilakukan oleh sekolah yaitu RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) merupakan rencana penggunaan dana BOS.

Pertanggungjawaban lainnya adalah laporan penggunaan dana BOS dalam pelaporannya pihak sekolah sudah melakukan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu PERMENDIKBUD No. 63 Tahun 2023 dengan melakukan beberapa macam laporan yaitu laporan realisasi penggunaan dana tiap sumber dana, rekapitulasi realisasi penggunaan BOS, pencatatan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat, laporan aset, laporan ke Dinas Pendidikan, laporan daring ke Laman BOS Reguler. Pelaporan dana BOS di UPTD SMPN 12 Pematangsiantar melakukan pembuatan laporan sesuai dengan PERMENDIKBUD NO. 63 Tahun 2023 tentang pertunjuk teknis (JUKNIS) dana BOS. Sekolah melakukan pelaporan pertanggungjawaban kepada dinas terkait, mulai dari tingkat kota, provinsi serta tingkat pusat.

Perencanaan Pembangunan Pendidikan di UPTD SMPN 8 & 12 berdasarkan Efektifitas Pemanfaatan Dana BOS

UPTD SMPN 8 Pematangsiantar memiliki visi untuk menjadi sekolah yang berkualitas dan berprestasi. Untuk mencapai visi tersebut, sekolah ini memerlukan Perencanaan Pembangunan Pendidikan yang efektif dan efisien:



1. Peningkatan kualitas pembelajaran :
 - Mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa.
 - Meningkatkan kualitas sumber daya, seperti buku pelajaran dan teknologi.
2. Peningkatan infrastruktur sekolah :
 - Pembangunan ruang kelas yang layak.
 - Peningkatan fasilitas lainnya, seperti toilet dan kantin.
3. Peningkatan kualitas guru dan staf :
 - Melakukan pelatihan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
 - Mengembangkan program pengembangan karir guru dan staf.

UPTD SMPN 12 Pematangsiantar memiliki visi untuk menjadi sekolah yang berkualitas dan berprestasi. Untuk mencapai visi tersebut, sekolah ini memerlukan Perencanaan Pembangunan Pendidikan yang efektif dan efisien:

1. Peningkatan kualitas pembelajaran :
 - Mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa.
 - Melakukan pelatihan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
 - Meningkatkan kualitas sumber daya, seperti buku pelajaran dan teknologi.
2. Peningkatan infrastruktur sekolah :
 - Pembangunan ruang kelas yang layak.
 - Pembangunan laboratorium yang memadai.
 - Peningkatan fasilitas lainnya, seperti toilet dan kantin.
3. Peningkatan kualitas guru dan staf :
 - Melakukan pelatihan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
 - Meningkatkan kesejahteraan guru dan staf.
 - Mengembangkan program pengembangan karir guru dan staf.

Pembahasan Akuntabilitas Pemanfaatan Dana BOS di UPTD SMPN 8 Pematangsiantar

Akuntabilitas pemanfaatan Dana BOS merupakan prinsip penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, karena setiap kegiatan dan penggunaan anggaran sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Di UPTD SMPN 8 Pematangsiantar, sumber dana utama yang digunakan untuk mendukung kegiatan dan kebutuhan operasional sekolah berasal dari Dana BOS. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana ini bertujuan agar laporan keuangan sekolah menjadi lebih berkualitas, transparan, dan dapat dipercaya. Selain akuntabilitas, efisiensi juga menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu penggunaan sumber daya sekolah secara tepat, hemat, dan optimal, baik dari segi tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, maupun waktu. Hal ini sejalan dengan Ummul (2019) yang menyatakan bahwa efisiensi merupakan ketepatan cara dalam melakukan sesuatu serta kemampuan melaksanakan tugas dengan baik tanpa membuang biaya, waktu, dan tenaga.

Berdasarkan hasil observasi dan studi dokumentasi, penggunaan Dana BOS di UPTD SMPN 8 Pematangsiantar telah berjalan secara efisien dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Penggunaan dana tersebut telah direalisasikan sesuai kebutuhan siswa dan operasional sekolah, dengan alokasi Dana BOS tahun pembelajaran 2023 sebesar Rp. 1.100.000 per siswa dan terealisasi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana BOS telah mencukupi kebutuhan siswa selama proses pembelajaran. Pelaksanaan tersebut juga sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 2, yang menyatakan bahwa penggunaan Dana BOS Reguler harus diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dan hasil yang optimal. Dengan demikian, akuntabilitas dan efisiensi pemanfaatan Dana BOS berperan penting dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di UPTD SMPN 8 Pematangsiantar.

Pembahasan Akuntabilitas Pemanfaatan Dana BOS di UPTD SMPN 12 Pematangsiantar

Akuntabilitas pemanfaatan Dana BOS memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, karena setiap kegiatan dan penggunaan anggaran sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Di UPTD SMPN 12 Pematangsiantar, Dana BOS digunakan untuk mendukung kegiatan dan kebutuhan operasional



sekolah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana ini bertujuan agar laporan keuangan sekolah menjadi berkualitas, transparan, dan dapat dipercaya. Selain itu, efisiensi juga menjadi prinsip penting dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu penggunaan sumber daya sekolah secara hemat dan tepat, baik dalam pemanfaatan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, maupun waktu. Hal ini sejalan dengan Ummul (2019) yang menyatakan bahwa efisiensi merupakan ketepatan cara dalam melakukan sesuatu serta kemampuan melaksanakan tugas dengan baik tanpa membuang biaya, waktu, dan tenaga.

Berdasarkan hasil observasi dan studi dokumentasi, penggunaan Dana BOS di UPTD SMPN 12 Pematangsiantar telah berjalan secara efisien dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Penggunaan dana tersebut telah direalisasikan sesuai kebutuhan siswa dan operasional sekolah, dengan alokasi Dana BOS tahun pembelajaran 2023 sebesar Rp. 1.100.000 per siswa dan terealisasi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana BOS telah mencukupi kebutuhan siswa selama proses pembelajaran di sekolah. Pelaksanaan tersebut juga sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 2, yang menyatakan bahwa penggunaan Dana BOS Reguler harus diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dan hasil yang optimal. Dengan demikian, akuntabilitas dan efisiensi pemanfaatan Dana BOS berperan penting dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di UPTD SMPN 12 Pematangsiantar.

Perencanaan Pembangunan Pendidikan di UPTD SMPN 8 & 12 berdasarkan Akuntabilitas Pemanfaatan Dana BOS

UPTD SMPN 8 Pematangsiantar memiliki visi untuk menjadi sekolah yang berkualitas dan berprestasi. Untuk mencapai visi tersebut, sekolah ini memerlukan Perencanaan Pembangunan Pendidikan yang efektif dan efisien:

1. Pengembangan Kurikulum
Mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa.
2. Pembangunan Infrastruktur
Meningkatkan kondisi infrastruktur sekolah, seperti pembangunan ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas lainnya.
3. Pengawasan dan Evaluasi
Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana.

UPTD SMPN 12 Pematangsiantar memiliki visi untuk menjadi sekolah yang berkualitas dan berprestasi. Untuk mencapai visi tersebut, sekolah ini memerlukan Perencanaan Pembangunan Pendidikan yang efektif dan efisien:

1. Pengembangan Kurikulum
Mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa.
2. Pelatihan Guru
Melakukan pelatihan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
3. Pembangunan Infrastruktur
Meningkatkan kondisi infrastruktur sekolah, seperti pembangunan ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas lainnya.

Pembahasan Transparansi Pemanfaatan Dana BOS di UPTD SMPN 8 Pematangsiantar

Transparansi atau keterbukaan adalah prinsip untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Transparansi dalam penggunaan keuangan sekolah sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan orang tua, siswa, masyarakat dan pemerintah dan menjadikan sekolah tersebut bermutu.

Peran efisiensi terhadap transparansi berarti adanya ketepatan cara dalam melakukan keterbukaan informasi dalam melaksanakan tugas dengan baik dan tanpa membuang biaya, waktu dan tenaga. Berdasarkan hasil penelitian manfaat bagi efisiensi mengenai dana BOS pada UPTD SMPN 8 Pematangsiantar dalam proses penggunaan keuangan sekolah dalam penyusunan keuangan keuangan sekolah melibatkan tim-tim sekolah sudah sangat transparan. Untuk mengetahui manfaat bagi efisiensi



terhadap transparansi dalam pengelolaan keuangan di UPTD SMPN 8 Pematangsiantar, peneliti menggunakan metode angket, wawancara dan studi dokumen untuk menggali informasi yang berkaitan, dimana informasi didapatkan dari hasil informan yang terlibat seperti Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Operator, Pengurus Barang, Guru & Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah dan Orangtua/Wali Peserta Didik.

Peran efisiensi terhadap transparansi ini untuk membangun kepercayaan kepada semua pihak mengenai anggaran sekolah yang dilakukan UPTD SMPN 8 Pematangsiantar yakni membangun kepercayaan dengan memberikan keterbukaan informasi dalam perencanaan kegiatan siswa dalam perumusan RKAS melibatkan seluruh guru untuk memenuhi kebutuhan siswa, pembuatan RKAS di UPTD SMPN 8 Pematangsiantar sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat berdasarkan adanya tanggungjawab dari setiap penanggungjawab kegiatan yang telah direncanakan dan didalam pembuatannya melibatkan seluruh kebutuhan sekolah yang disusun oleh guru dan tenaga kependidikan UPTD SMPN 8 Pematangsiantar. Dengan demikian maka kegiatan perencanaan dilakukan dengan keterbukaan dengan selalu melaporkan pengeluaran yang ada di setiap bulannya. Analisis dilakukan berdasarkan wawancara terhadap pihak masyarakat sekolah dimana partisipan cenderung tidak peduli dalam proses pengawasan penggunaan anggaran dan BOS UTPD SMPN 8 Pematangsiantar

Pembahasan Transparansi Pemanfaatan Dana BOS di UPTD SMPN 12 Pematangsiantar

Transparansi atau keterbukaan adalah prinsip untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Transparansi dalam penggunaan keuangan sekolah sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan orang tua, siswa, masyarakat dan pemerintah dan menjadikan sekolah tersebut bermutu, berakhlak dan berdaya saing.

Peran efisiensi terhadap transparansi berarti adanya ketepatan cara dalam melakukan keterbukaan informasi dalam melaksanakan tugas dengan baik dan tanpa membuang biaya, waktu dan tenaga. Berdasarkan hasil penelitian manfaat bagi efisiensi mengenai dana BOS pada UPTD SMPN 12 Pematangsiantar dalam proses penggunaan keuangan sekolah dalam penyusunan keuangan keuangan sekolah melibatkan tim-tim sekolah yang sudah profesional dan sangat transparan. Untuk mengetahui manfaat bagi efisiensi terhadap transparansi dalam pengelolaan keuangan di UPTD SMPN 12 Pematangsiantar, peneliti menggunakan metode angket, wawancara dan studi dokumen untuk menggali informasi yang berkaitan, dimana informasi didapatkan dari hasil informan yang terlibat seperti Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Operator, Pengurus Barang, Guru & Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah dan Orangtua/Wali Peserta Didik.

Peran efisiensi terhadap transparansi ini untuk membangun kepercayaan kepada semua pihak mengenai anggaran sekolah yang dilakukan UPTD SMPN 12 Pematangsiantar yakni : mengedepankan serta membangun kerjasama maupun kepercayaan dengan memberikan keterbukaan informasi dalam perencanaan kegiatan siswa dalam perumusan RKAS melibatkan seluruh guru untuk memenuhi kebutuhan siswa, pembuatan RKAS di UPTD SMPN 12 Pematangsiantar sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat berdasarkan adanya tanggungjawab dari setiap penanggungjawab kegiatan yang telah direncanakan dan didalam pembuatannya melibatkan seluruh kebutuhan sekolah yang disusun oleh guru dan tenaga kependidikan UPTD SMPN 8 Pematangsiantar berdasarkan petunjuk teknis (JUKNIS) BOS maupun aturan lainnya yang berlaku dan relevan. Dengan demikian maka kegiatan perencanaan dilakukan dengan keterbukaan dengan selalu melaporkan pengeluaran yang ada di setiap bulannya. Analisis dilakukan berdasarkan wawancara terhadap pihak masyarakat sekolah dimana partisipan cenderung kurang peduli dalam proses pengawasan tetapi berharap kirannya penggunaan anggaran dan BOS UTPD SMPN 12 Pematangsiantar untuk kepentingan operasional sekolah.

Perencanaan Pembangunan Pendidikan di UPTD SMPN 8 & 12 Pematangsiantar berdasarkan Transparansi Pemanfaatan Dana BOS

UPTD SMPN 8 Pematangsiantar memiliki visi untuk menjadi sekolah yang berkualitas dan berprestasi. Untuk mencapai visi tersebut, sekolah ini memerlukan Perencanaan Pembangunan Pendidikan yang efektif dan efisien:

1. Laporan Keuangan



- Membuat laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh publik.
- 2. Sosialisasi
Melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan Dana BOS kepada siswa, guru, dan orang tua siswa.
- 3. Pengumuman
Mengumumkan informasi tentang pemanfaatan Dana BOS melalui papan pengumuman, website, dan media sosial.

UPTD SMPN 12 Pematangsiantar memiliki visi untuk menjadi sekolah yang berkualitas dan berprestasi. Untuk mencapai visi tersebut, sekolah ini memerlukan Perencanaan Pembangunan Pendidikan yang efektif dan efisien:

1. Laporan Keuangan
Membuat laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh publik.
2. Laporan Kegiatan
Membuat laporan kegiatan yang transparan dan dapat diakses oleh publik.
3. Sosialisasi
Melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan Dana BOS kepada siswa, guru, dan orang tua siswa.
4. Pengumuman
Mengumumkan informasi tentang pemanfaatan Dana BOS melalui papan pengumuman, website, dan media sosial.

Pembahasan Efektifitas, Akuntabilitas dan Transparansi Pemanfaatan Dana BOS di UPTD SMPN 8 & 12 Pematangsiantar

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dalam pengelolaan dana BOS Reguler kepala sekolah wajib/harus membentuk Tim BOS Sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara BOS, operator, pengurus barang, guru & tenaga kependidikan, komite sekolah dan orangtua/wali peserta didik.

Berdasarkan Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Daerah, bendahara BOS adalah tenaga kependidikan non guru atau tenaga kependidikan yang diangkat dengan SK Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya atas usulan dari Kepala SKPD. Khusus untuk anggota Tim BOS terdiri dari satu orang yang berasal dari unsur orangtua/wali peserta didik di luar komite sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah.

Berdasarkan hasil angket, observasi, wawancara dan studi dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Efektifitas, Akuntabilitas dan Trnaspuransi Pemanfaatan Dana BOS UPTD SMPN 8 dan UPTD SMPN 12 Pematangsiantar sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Daerah yakni :

- 1) Tim BOS Sekolah dengan melibatkan bendahara BOS, guru dan tenaga kependidikan , komite sekolah serta orangtua/wali peserta didik di luar komite sekolah.
- 2) Tim BOS sekolah sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab
- 3) Secara khusus mengisi data sekolah secara lengkap dan valid ke DAPODIK serta bertanggungjawab terhadap hasil isian data sekolah.
- 4) Merencanakan dan menyusun RKAS dan memasukkan data pada sistem dari pemerintah.
- 5) Realisasi penggunaan dana BOS sudah mengakomodir serta memenuhi ketentuan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS.
- 6) Melaporkan dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan (LPJ) dana BOS pada papan anggaran yang tersedia.

Perencanaan Pembangunan Pendidikan di UPTD SMPN 8 & 12 Pematangsiantar berdasarkan Efektifitas, Akuntabilitas dan Transparansi Pemanfaatan Dana BO

UPTD SMPN 8 Pematangsiantar memiliki visi untuk menjadi sekolah yang berkualitas dan berprestasi. Untuk mencapai visi tersebut, sekolah ini memerlukan Perencanaan Pembangunan Pendidikan yang efektif dan efisien:

1. Pengembangan Kurikulum
Mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa.
2. Pelatihan Guru



- Melakukan pelatihan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
3. Pengawasan dan Evaluasi
Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana.
 4. Meningkatkan prestasi siswa
Pemanfaatan ajang dan event lomba akademik maupun non akademik.
- UPTD SMPN 12 Pematangsiantar memiliki visi untuk menjadi sekolah yang berkualitas dan berprestasi. Untuk mencapai visi tersebut, sekolah ini memerlukan Perencanaan Pembangunan Pendidikan yang efektif dan efisien:
1. Pengembangan Kurikulum
Mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa.
 2. Pembangunan Infrastruktur
Meningkatkan kondisi infrastruktur sekolah, seperti pembangunan ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas lainnya.
 3. Meningkatkan kualitas pendidikan
Pemanfaatan kegiatan ekstrakurikuler sesuai kebutuhan siswa
 4. Meningkatkan kepercayaan publik
Pemanfaatan ruang publik untuk publikasi secara umum terkait perencanaan, realisasi dan pertanggungjawaban (LPJ) Dana BOS.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data serta pembahasannya, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan tanggapan responden, efektivitas pengelolaan dana BOS pada kedua sekolah berada dalam kategori baik hingga sangat baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana BOS pada kedua sekolah telah berjalan efektif, namun tingkat efektivitas di UPTD SMP Negeri 12 relatif lebih tinggi dibandingkan UPTD SMP Negeri 8 berdasarkan persepsi responden.
2. Berdasarkan hasil analisis penelitian, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS pada kedua sekolah secara umum berada dalam kategori baik hingga sangat baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana BOS pada kedua sekolah telah memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi, namun UPTD SMP Negeri 12 Pematangsiantar menunjukkan tingkat penerapan yang relatif lebih tinggi dibandingkan UPTD SMP Negeri 8.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiyana, Marita, (2008), Mekanisme Akuntabilitas LOD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Spirit Publik Vol. 4, No. 2, Oktober 2008 Hal. 169 – 184
- Andi. Mardiasmo, (2006). “Mewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance.”Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. 2, No. 1, Mei 2006. Hal 1 – 17.
- Arianto, Alang, (2008), Aspek Keadilan Program Bantuan Operasional Sekolah Bagi Keluarga Miskin, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta
- Arikunto, Suharsimi, (2000), Prosedur Penelitian, Jakarta; Rineke Cipta
- Asian Development Bank, (1999), Governance : Sound Development Management, (<http://www.tempointeraktif.com>)
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri, (2002) Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah .
- Budiardjo, Miriam, (2000), Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat, Bandung : Mizan.
- Bungin, Burhan Hm.(2008), Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta : Kencana.
- Choiri, Nur hidayatul, (2006). Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Studi Kasus tentang Akuntabilitas Administratif Pelaksana Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar



- Sembilan Tahun di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, (<http://www.tempointeraktif.com>)
- Departemen Pendidikan Nasional, (2009), Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka wajib belajar 9 tahun, 2009.
- Hamadah, Zulfiah, (2009), Sumber-Sumber, Efisiensi dan Efektivitas Pembiayaan Pendidikan, (<http://www.manajemenpendidikan.com>)
- Handyaningrat, Soewarno, (1986), Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan manajemen, Jakarta, Penerbit Gunung Agung.
- Harfa, Fahmi, (2006), Evaluasi Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Sekolah di Kota Bandar (<http://www.tempointeraktif.com>) Lampung Tahun 2005,
- Jackson, P.M. (1982). *The Political Economy of Bureaucrazy*. Oxford : Philip Allan Publishers Limited.
- Jalal Fasli & Supriadi Dedi. (2001), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adi Cita
- Krina P, Loina Lalolo,(2003),*Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta : Sekretariat Good Public Governance Bappenas.
- Mardiasmo, (2002), *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo, (2003), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta
- Moleong, Lexy, J, (2005), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya.
- Natawijaya, Rachman. (1999). *Psikologi Umum dan Sosial*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Parwita, Diah Desi. (2008). “Evaluasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Kasus Pengelolaan Keuangan SMP Negeri di Kabupaten Bayumas” Tesis Pogram Magister Akuntansi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Prihantoro, FX Triyas Hadi, (2009), Kolaborasi Menyelamatkan Dana BOS, Suara Pembaruan September 2009, (<http://www.suarapembaruan.com>)
- Rijal, Asep, (2009), Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Tingkat Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Garut, Skripsi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Garut.
- Ruswati, (2005), Efektivitas Pelayanan Publik : Pengaruh Disiplin Dan Iklim Kerja TerhadapEfektivitas Pelayanan Aparat Pemerintah Kelurahan Di Kecamatan Cilacap (<http://www.suarapembaruan.com> Utara) Kabupaten Cilacap,
- Sadjiarto,Arja, (2000) “Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan”. *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vol. 2, No. 2, Nopember 2000: 138 – 150 Universitas Kristen Petra (<http://puslit.petra.ac.id/journals>)
- Santoso, Dwi, (2007), Keefektivan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Rangka Program Peningkatan Mutu Pembelajaran Di SD se Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, Skripsi, Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
- Setiawan,Tomy, (2009), Ajari Sekolah Soal Transparansi, Harian Jogja, 1 septembert 2009, (<http://www.suarapembaruan.com>)
- Terry, George,R (2000), *Prinsip-Prinsip Manajemen*, alih bahasa oleh J.Smith. D.F.M, Jakarta, Bumi Aksara.
- Wiguna, (2008), “ICW Temukan Penyimpangan BOS”, *Tempo Interaktif*, 28 Oktober 2008, (<http://www.tempointeraktif.com>)

